



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERAN BUMN DALAM MEMENUHI TUNTUTAN AMERIKA SERIKAT

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang mematangkan strategi untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat (AS) dalam menyeimbangkan neraca perdagangan dan investasi. Langkah ini menyikapi kebijakan perdagangan proteksionisme AS, khususnya potensi penerapan tarif resiprokal, yang dapat berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Pemerintah menilai bahwa upaya menjaga keseimbangan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat hubungan bilateral sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Salah satu strategi yang tengah dikaji adalah peningkatan impor minyak mentah dan gas cair (LPG) dari AS. Pemerintah menilai bahwa sektor energi menjadi sektor strategis yang dapat dijadikan medium diplomasi perdagangan. Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa impor minyak mentah dari AS akan ditingkatkan hingga 30 persen dari total volume impor nasional, naik signifikan dari realisasi saat ini yang baru sekitar 4 persen. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi diplomatik yang konstruktif sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber pasokan.

Selain sektor energi, pemerintah juga menekankan pentingnya hilirisasi industri dalam negeri. Tuntutan AS agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi. Oleh karena itu, BUMN ditugaskan menjadi pelaku utama dalam pengembangan sektor-sektor prioritas seperti pengolahan mineral (nikel, bauksit), energi baru dan terbarukan, serta manufaktur teknologi tinggi seperti baterai kendaraan listrik (EV). Kebijakan hilirisasi ini diharapkan tidak hanya merespons tekanan eksternal, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan penguatan daya saing nasional.

Namun demikian, arah kebijakan ini tidak lepas dari sejumlah tantangan serius. Peningkatan impor dari AS berisiko memperbesar ketergantungan terhadap produk luar negeri dan menekan neraca perdagangan sektor migas. Di sisi lain, hilirisasi industri membutuhkan waktu, investasi besar, dan kesiapan teknologi serta sumber daya manusia. Jika tidak diatur dan diawasi secara hati-hati, kebijakan ini dapat membuka celah bagi inefisiensi dan penyimpangan di tubuh BUMN. Dalam konteks inilah peran DPR RI, khususnya Komisi VI yang membidangi BUMN, perdagangan, dan investasi, menjadi sangat krusial. Komisi VI memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah di sektor-sektor tersebut. Komisi ini diharapkan aktif mengawal proses peningkatan impor energi dari AS, memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas di BUMN, serta mendorong agar proses hilirisasi benar-benar menciptakan nilai tambah ekonomi yang riil bagi bangsa.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga harus mengkritisi dan mengevaluasi setiap bentuk kesepakatan perdagangan dan investasi internasional yang berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia. Langkah ini penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional, memastikan keberlanjutan fiskal, serta menjamin bahwa semua kebijakan BUMN tetap berada dalam kerangka kepentingan rakyat dan pembangunan jangka panjang.

Atensi DPR

DPR RI perlu memberikan perhatian serius terhadap langkah pemerintah dalam memenuhi tuntutan perdagangan Amerika Serikat (AS). Komisi VI DPR RI, yang membidangi urusan BUMN, perdagangan, dan investasi, memiliki peran strategis dalam mengawasi agar kebijakan ini tidak merugikan industri dalam negeri, terutama sektor-sektor strategis seperti energi, manufaktur, dan hilirisasi mineral. DPR RI harus memastikan bahwa peningkatan impor dari AS dilakukan secara selektif, berdasarkan kebutuhan nasional, serta tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap produk luar negeri. Selain itu, DPR RI perlu mendorong agar setiap kebijakan investasi dan impor dilakukan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Komisi VI harus aktif melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan ini untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan global dan kedaulatan ekonomi nasional. BUMN harus tetap diarahkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, bukan sekadar instrumen diplomasi dagang.

Sumber

Kompas, 21 Mei 2025;

kompas.com, 20 Mei 2025;

suara.com, 20 Mei 2025.

Minggu ke-4 Mei
(19 s.d. 25 Mei 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*